



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PARDASUKA**

Email: Sman1pardasuka@gmail.com NPSN: 69762684
Jl. Sukamanah No. 001, Pekon Pardasuka, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung



**ASESMEN SUMATIF AKHIR SEMESTER GANJIL
TAHUN AJARAN 2025/2026**

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN PANCASILA
KELAS / FASE : X / E

HARI / TANGGAL : Rabu, 3 Desember 2025
WAKTU : 09.00 s.d. 10.00

A. PILIHAN GANDA

Pilihlah salah satu jawaban A, B, C, D, atau E yang merupakan jawaban paling benar !

1. Pelaksanaan sidang BPUPK pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 dengan jumlah total 32 tokoh anggota yang menyampaikan pidatonya. Sidang BPUPK Pertama bertujuan untuk
A. Penentuan proklamasi
B. Menyusun undang-undang
C. Menetapkan wilayah negara
D. Merumuskan dasar negara
E. Pembentukan komite nasional
2. Di tengah kondisi politik yang semakin dinamis, pemerintahan pendudukan Jepang mengumumkan pembentukan sebuah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Badan ini kemudian dikenal sebagai Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Tokoh yang diberikan wewenang untuk memimpin BPUPK adalah....
A. Ir. Soekarno
B. Mohammad Hatta
C. Mohammad Yamin
D. Mr. Achmad Soebarjo
E. Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat
3. Sila kedua yang diusulkan Soekarno adalah Internasionalisme atau Perikemanusiaan. Soekarno berulang kali menekankan bahwa nasionalisme Indonesia tidak boleh menjadi *chauvinisme* yang memicu konflik, tetapi harus berjalan seiring dengan prinsip kemanusiaan. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa makna Internasionalisme menurut Soekarno adalah...
A. Menempatkan sikap nasionalisme sebagai prioritas utama dalam hubungan antar negara.
B. Memperlakukan bangsa lain sebagai musuh dalam persaingan antar negara
C. Mengutamakan kepentingan perdamaian dunia di atas kepentingan nasional Indonesia.
D. Menciptakan hubungan harmonis dengan bangsa lain dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan perdamaian abadi.
E. Menjalin hubungan harmonis dengan bangsa lain untuk menjadikan mereka sebagai warga negara Indonesia.
4. Sila keempat yang diusulkan Soekarno adalah Kesejahteraan Sosial. Soekarno menyebutkan bahwa negara yang didirikan harus mampu mewujudkan "sosialisme Indonesia" di mana tidak ada kemiskinan di antara rakyatnya. Makna dari sila ini adalah...
A. Mengutamakan kesejahteraan individu di atas kesejahteraan bersama.
B. Menghapus kepemilikan pribadi dan menyerahkan semuanya kepada negara agar tercipta masyarakat yang setara.
C. Menciptakan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi, sehingga tidak ada lagi kesenjangan sosial dan kemiskinan.
D. Menekankan bahwa kesejahteraan hanya dapat dicapai melalui perjuangan ekonomi militer yang terorganisir.
E. Menjadikan negara sebagai penjaga kebebasan ekonomi tanpa batas sehingga menciptakan kesejahteraan bersama.
5. Sila terakhir yang diusulkan Soekarno adalah Ketuhanan Yang Berkebudayaan. Soekarno dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia bukanlah negara teokrasi, tetapi juga bukan negara yang tidak bertuhan. Frasa "berkebudayaan" pada sila ini menunjukkan bahwa...
A. Negara menjamin setiap warga negara bebas memeluk agamanya dan melaksanakannya sesuai tradisi budaya masing-masing.
B. Negara wajib mengakui dan melindungi satu agama yang sesuai dengan budaya asli bangsa Indonesia.
C. Negara harus mengatur pelaksanaan ibadah agar sesuai dengan norma-norma budaya yang berlaku.
D. Negara memfasilitasi dialog antarumat beragama untuk mencapai kesepakatan tentang cara beribadah yang paling berbudaya.
E. Negara menghormati keyakinan warga negara dan menjamin kebebasan beribadah dengan cara yang beradab dan saling menghormati.
6. Jika kita menganalisis tiga usulan dasar negara dari Moh. Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno, persamaan yang paling mencolok dan menjadi benang merah di antara ketiganya adalah...
A. Ketiganya mengusulkan negara harus berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat.
B. Semua mengusulkan agar sila pertama berbunyi "Ketuhanan", agar negara selalu berpedoman pada ajaran agama.
C. Ketiganya memiliki pandangan bahwa negara harus berdasarkan atas semangat solidaritas dan internasionalisme.
D. Ketiganya bersepakat bahwa dasar negara harus mencerminkan nilai-nilai kebangsaan, kerakyatan/musyawaharah, dan ketuhanan.
E. Tidak ada satupun persamaan di antara ketiga usulan rumusan dasar negara tersebut.
7. Terdapat narasi historis bahwa Piagam Jakarta yang disepakati oleh Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945 merupakan sebuah musyawarah antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam dalam BPUPKI. Musyawarah ini dicapai setelah perdebatan yang panjang. Rumusan Piagam Jakarta, terutama pada kalimat "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya," pada akhirnya dianggap tidak relevan untuk dijadikan dasar negara yang mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam, alasan rumusan itu dirubah adalah...

- A. Rumusan tersebut dapat berpotensi menimbulkan perpecahan dan tidak sesuai dengan keberagaman agama di Indonesia
 - B. Dapat menimbulkan kekhawatiran dari negara-negara lain bahwa Indonesia akan menjadi negara Islam
 - C. Kelompok nasionalis tidak setuju dengan rumusan tersebut sejak awal karena tidak sesuai kekayaan Indonesia
 - D. Rumusan tersebut tidak didukung oleh mayoritas anggota panitia sembilan
 - E. Rumusan tersebut dianggap hanya merujuk pada golongan minoritas dan bertentangan dengan UUD 1945
8. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, PPKI melaksanakan sidang pertamanya. Sidang tersebut mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dilaksanakan pada tanggal...
 - A. 1 Juni 1945
 - B. 22 Juni 1945
 - C. 17 Agustus 1945
 - D. 18 Agustus 1945
 - E. 1 Oktober 1945
 9. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya seluruh peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan keputusan negara harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Pernyataan tersebut merupakan makna kedudukan Pancasila sebagai...
 - A. Ideologi negara
 - B. Pandangan hidup bangsa
 - C. Dasar negara
 - D. Identitas negara
 - E. Lambang negara
 10. Pernyataan yang paling tepat untuk menggambarkan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara adalah...
 - A. Pancasila merupakan landasan bagi terbentuknya undang-undang baru bagi wilayah tertentu..
 - B. Pancasila adalah falsafah yang hanya berlaku dalam ranah politik dan negara.
 - C. Pancasila berfungsi sebagai alat untuk menanggulangi ancaman ideologi lain.
 - D. Pancasila menjadi tolak ukur bagi setiap kebaruan peraturan perundang-undangan.
 - E. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara yang tidak dapat diubah oleh siapapun.
 11. Pancasila sebagai dasar negara bukanlah hasil pemikiran satu orang, melainkan buah dari perdebatan, musyawarah, dan mufakat para pendiri bangsa. Prinsip utama yang dapat kita petik dari proses perumusan Pancasila yang kompleks ini adalah bahwa...
 - A. Dasar negara harus selalu direvisi sesuai dengan perkembangan kebudayaan dan teknologi.
 - B. kekuatan sebuah negara terletak pada dominasi satu kelompok atau ideologi, agar persatuan bangsa dapat terwujud.
 - C. musyawarah mufakat adalah kunci untuk mencapai kesepakatan dalam perbedaan, terutama dalam membangun fondasi negara yang majemuk.
 - D. dasar negara harus dibuat oleh seorang pemimpin tunggal yang visioner, agar tercipta visi bangsa yang unggul.
 - E. perdebatan yang panjang hanya akan memperlambat kemajuan suatu bangsa.
 12. Selain berkedudukan sebagai Ideologi Negara, Pancasila juga memiliki kedudukan sebagai Pandangan hidup bangsa. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berarti...
 - A. Pancasila digunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah ekonomi negara.
 - B. Pancasila merupakan ideologi terbuka yang dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman.
 - C. Pancasila menjadi pedoman bagi setiap warga negara dalam bersikap dan bertingkah laku.
 - D. Pancasila digunakan sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia.
 - E. Pancasila menjadi acuan dalam hubungan internasional.
 13. *Ilustrasi cerita di bawah untuk soal No. 23 dan 24!*
 Dalam suatu rapat desa untuk menentukan lokasi pembangunan fasilitas umum, terjadi perbedaan pendapat yang tajam. Kepala desa kemudian mengarahkan seluruh peserta untuk berdiskusi secara terbuka, mendengarkan setiap aspirasi, dan mencari solusi terbaik yang tidak merugikan pihak mana pun, bahkan jika harus mengalah. Sikap kepala desa ini menunjukkan implementasi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, terutama dalam konteks...
 - A. Mewujudkan kehidupan yang harmonis.
 - B. Menciptakan persatuan bangsa.
 - C. Menyelesaikan konflik secara musyawarah mufakat.
 - D. Memperkuat identitas nasional.
 - E. Menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
 14. Tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa di atas merupakan aktualisasi sila dalam Pancasila yang dilambangkan dengan...
 - A. Bintang
 - B. Rantai Emas
 - C. Pohon Beringin
 - D. Kepala Banteng
 - E. Padi dan Kapas
 15. Di daerah Tapanuli Utara, Sumatera Utara, terdapat tradisi gotong royong yang dikenal sebagai Marosok. Tradisi ini berfokus pada kegiatan jual-beli hasil pertanian dengan sistem barter, di mana pembeli dan penjual saling menolong dan menjaga harga agar tidak saling merugikan. Dari deskripsi tersebut, nilai utama yang paling menonjol dari tradisi Marosok adalah...
 - A. Keterbukaan dan transparansi.
 - B. Musyawarah dan keadilan ekonomi.
 - C. Kekeluargaan dan persaingan.
 - D. Individualisme dan persaingan.
 - E. Konsumtif dan egoisme
 16. Kegiatan gotong royong dari berbagai budaya di Indonesia seperti Alak-tolong di Minangkabau, Marosok di Sumatera Utara, Mapalus di Minahasa, Subak di Bali, dan sejenisnya merupakan aktualisasi sila....
 - A. Ketuhanan Yang Maha Esa
 - B. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
 - C. Persatuan Indonesia
 - D. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
 - E. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
 17. Dino membuat kerajinan tangan untuk dijual di bazar sekolah. Ia memutuskan untuk menyisihkan sebagian keuntungannya untuk membantu temannya yang sedang sakit dan membutuhkan biaya pengobatan. Tindakan Dino ini paling tepat mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu...
 - A. Sila pertama, karena ia berbagi dengan tulus.
 - B. Sila kedua, karena ia peduli pada kondisi temannya.

- C. Sila ketiga, karena ia memperkuat tali persahabatan.
 D. Sila keempat, karena ia mengambil keputusan tanpa meminta bantuan.
 E. Sila kelima, karena ia berupaya mewujudkan keadilan sosial
18. Toni dan Rika memiliki keyakinan agama yang berbeda. Saat jam istirahat, Toni pergi ke Mushola untuk shalat. Rika yang sedang bermain di dekatnya, sengaja tidak membuat keributan agar tidak mengganggu Toni. Sikap Rika ini mencerminkan pengamalan Pancasila, yaitu...
- A. Sila pertama, karena ia menunjukkan toleransi beragama.
 B. Sila kedua, karena ia peduli pada temannya.
 C. Sila ketiga, karena ia menjaga kerukunan.
 D. Sila keempat, karena ia menghargai keputusan Toni.
 E. Sila kelima, karena ia bersikap adil.
19. SMA Impian Bangsa mengadakan pemilihan ketua OSIS dengan serangkaian kegiatan, mulai dari seleksi, wawancara, debat kandidat, sampai pemilihan langsung oleh semua warga sekolah. Hal ini menunjukkan aktualisasi Pancasila pada sila....
- A. Ketuhanan Yang Maha Esa
 B. Kemanusiaan yang adil dan beradab
 C. Persatuan Indonesia
 D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
 E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
20. Siswa di kelasmu berdiskusi untuk menentukan tujuan karyawisata. Mereka mendengarkan semua pendapat hingga mencapai kesepakatan. Cara mereka menyelesaikan masalah ini adalah contoh dari aktualisasi sila...
- A. Pertama
 B. Kedua
 C. Ketiga
 D. Keempat
 E. Kelima
21. Sila 'Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia' mengajarkan bangsa Indonesia untuk mengamalkan nilai Keadilan. Berikut contoh pengamalan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat adalah
- A. Memberikan bantuan secara merata kepada semua masyarakat tanpa terkecuali
 B. Memberikan sesuatu kepada masyarakat sesuai haknya
 C. Pemberian gaji karyawan dengan jumlah yang sama rata
 D. Perlakuan yang berbeda antara masyarakat umum dan pejabat
 E. Mengikuti kegiatan di desa dengan seperlunya saja
22. Setiap pagi Dino selalu menyapa dan salim kepada Bapak/Ibu guru di depan gerbang ketika berangkat sekolah. Sikap Dino tersebut merupakan implementasi Pancasila pada sila yang dilambangkan dengan....
- A. Bintang
 B. Rantai Emas
 C. Pohon Beringin
 D. Kepala Banteng
 E. Padi dan Kapas
23. Di media sosial, marak terjadi penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang memicu perpecahan di masyarakat. Perilaku ini menunjukkan lunturnya pengamalan Pancasila secara keseluruhan. Solusi yang paling efektif untuk mengatasi kasus ini adalah...
- A. Memblokir semua akun yang menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian.
 B. Membuat undang-undang yang lebih ketat tentang penggunaan media sosial.
 C. Memperkuat literasi digital dan mengajak pengguna media sosial untuk menjadi agen perdamaian.
 D. Melaporkan semua akun yang menyebarkan konten negatif kepada pihak berwajib.
 E. Mengabaikan semua hoaks dan ujaran kebencian agar tidak semakin viral.
24. Seorang pejabat publik terbukti menerima suap dari pengusaha untuk meloloskan proyek yang tidak sesuai prosedur. Perilaku korupsi ini sangat merugikan rakyat dan bertentangan dengan sila kelima Pancasila. Gagasan solutif untuk menyikapi hal tersebut adalah...
- A. Memperkuat lembaga pengawasan seperti KPK dan BPK.
 B. Membubarkan lembaga pemerintahan yang bermasalah.
 C. Menerapkan sistem keuangan yang rahasia.
 D. Selalu menolak ketika ada kebijakan atau proyek baru.
 E. Mewajarkan segala bentuk proyek mencurigakan.
25. Pada dasarnya setiap orang memiliki keinginan untuk berbuat baik dan taat hukum karena merupakan pemenuhan kebutuhan akan kehidupan bersama. Keinginan setiap orang untuk berbuat baik dan taat hukum pada dasarnya muncul karena hal itu merupakan pemenuhan kebutuhan untuk...
- A. Pengakuan sosial dan penghargaan dari pemerintah.
 B. Kemudahan dalam mencari nafkah.
 C. Kehidupan bersama yang harmonis dan tertib.
 D. Kepuasan spiritual dan moral pribadi.
 E. Kekuatan untuk memimpin dan mengatur orang lain.
26. Indonesia adalah negara hukum, yang berarti segala tatanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku dan diatur dalam konstitusi, tepatnya pada UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal...
- A. 1 ayat 1
 B. 1 ayat 2
 C. 1 ayat 3
 D. 3 ayat 1
 E. 3 ayat 2
27. Melalui adanya kesadaran hukum dari semua masyarakat diharapkan tujuan hukum dapat tercapai. Secara umum, tujuan hukum adalah untuk menciptakan....
- A. Kenyamanan dan kekayaan
 B. Kenyamanan dan kejelasan
 C. Kejelasan dan kekayaan
 D. Ketertiban dan kenyamanan
 E. Ketertiban dan kekayaan
28. Para ahli hukum membuat klasifikasi atau pembagian hukum. Berdasarkan bentuknya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum...
- A. Privat dan Publik
 B. Terbuka dan Tertutup
 C. Pidana dan Perdata
 D. Positif dan Negatif
 E. Tertulis dan Tidak tertulis
29. Salah satu ciri utama perilaku taat hukum adalah memahami pentingnya pelaksanaan dan penegakan hukum. Implementasi dari pemahaman ini dalam kehidupan sehari-hari adalah...
- A. Selalu mencari celah hukum untuk menghindari sanksi dan kewajiban.

- B. Hanya menaati norma hukum, bukan norma agama atau kesucilaan.
 - C. Menganggap semua peraturan adalah batasan yang menghambat kebebasan.
 - D. Mendukung upaya pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mewujudkan ketertiban.
 - E. Berusaha untuk hanya menaati hukum saat ada petugas yang mengawasi.
30. Jika seseorang memiliki ciri perilaku taat hukum, yaitu tidak menimbulkan kerugian pada diri dan orang lain, maka tindakan yang menunjukkan ciri tersebut adalah...
- A. Mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi di jalan.
 - B. Menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum dengan terpaksa.
 - C. Melakukan demonstrasi secara ricuh di depan gedung DPR.
 - D. Mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa warisan.
 - E. Membayar pajak tepat waktu dan tidak membuang limbah sembarangan ke sungai.
31. Hak adalah segala sesuatu yang diterima dan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Di bawah ini yang merupakan suatu kewajiban warga negara adalah...
- A. Menaati hukum dan peraturan yang berlaku.
 - B. Memperoleh pendidikan gratis.
 - C. Dapat memilih dalam pemilihan umum.
 - D. Mendapatkan perlindungan dari aparat keamanan.
 - E. Menikmati fasilitas kesehatan yang memadai.
32. Prinsip utama yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang mengandung makna bahwa seorang warga negara...
- A. Harus menuntut semua haknya terlebih dahulu sebelum melakukan kewajiban apa pun.
 - B. Bebas memilih kapan akan melaksanakan hak dan kapan akan melaksanakan kewajiban.
 - C. Harus mendapatkan haknya secara utuh dan maksimal, namun tidak ada paksaan untuk melakukan kewajiban.
 - D. Harus mendahulukan pelaksanaan kewajiban dengan penuh tanggung jawab sebelum menuntut pemenuhan haknya.
 - E. Hanya boleh menerima hak sebesar kewajiban yang telah dilaksanakan oleh negara.
33. Seorang siswa yang menyontek saat ujian merupakan contoh tindakan yang paling jelas mengabaikan kewajiban pribadinya, yaitu kewajiban untuk...
- A. Membayar biaya sekolah tepat waktu.
 - B. Menjaga fasilitas umum dan sarana pendidikan.
 - C. Menaati peraturan sekolah untuk jujur dalam kegiatan akademik.
 - D. Menghormati guru sebagai pengawas ujian.
 - E. Menjaga keharmonisan kelas.
34. Salah satu faktor internal utama yang menyebabkan seorang warga negara cenderung melakukan pelanggaran hak orang lain atau pengingkaran kewajiban adalah...
- A. Adanya ketidaktegasan aparat penegak hukum.
 - B. Tingkat kesadaran bernegara yang rendah dan sikap egois.
 - C. Pelaksanaan kebijakan yang baik oleh pejabat publik.
 - D. Ketidakseimbangan fasilitas pendidikan antar daerah.
 - E. Tuntutan ekonomi yang tinggi dari lingkungan sosial.
35. Pelanggaran hak warga negara yang terjadi ketika seseorang secara sengaja mencemari lingkungan dengan membuang sampah di sungai adalah...
- A. Pelanggaran hak untuk melakukan hal sesukanya.
 - B. Pelanggaran hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
 - C. Pelanggaran hak untuk mendapatkan perlindungan dari aparat keamanan.
 - D. Pelanggaran hak untuk mendapatkan keadilan dalam mengelola kebersihannya.
 - E. Pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
36. Menurut Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, sumber hukum adalah sumber yang dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan hukum atau peraturan perundang-undangan. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah...
- A. UUD NRI Tahun 1945
 - B. Pancasila
 - C. Tap MPR
 - D. Peraturan Presiden
 - E. Peraturan Pemerintah
37. Jenis peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif yaitu DPRD Provinsi bersama dengan lembaga eksekutif yaitu Gubernur adalah...
- A. Peraturan perundang-undangan
 - B. Undang-undang
 - C. Peraturan Daerah Kabupaten
 - D. Peraturan Daerah Provinsi
 - E. Peraturan Pemerintah
38. Dalam hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan, UU dan Perppu memiliki hierarki yang hampir sama. Perbedaan mendasar antara proses pembentukan Undang-Undang (UU) dan Perppu terletak pada...
- A. Kekuatan hukumnya, di mana UU lebih kompleks dari Perppu.
 - B. Keterlibatan DPR di awal proses, di mana UU dibahas bersama DPR, sedangkan Perppu ditetapkan Presiden tanpa pembahasan awal dengan DPR.
 - C. Materi muatannya, di mana Perppu hanya mengatur tentang keuangan negara saja, sedangkan UU tidak.
 - D. Masa berlakunya, di mana UU bersifat sementara dan Perppu bersifat permanen dan tidak dapat diubah.
 - E. Target hukumnya, UU dibuat untuk warga negara sedangkan Perppu dibuat untuk pemerintah.
39. Dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (UU No. 12 Tahun 2011), kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah...
- A. Berada di atas Undang-Undang.
 - B. Berada di bawah Peraturan Pemerintah.
 - C. Sederajat (setingkat) dengan Undang-Undang.
 - D. Sederajat dengan Peraturan Presiden.
 - E. Berada di bawah Peraturan Daerah Provinsi
40. Berdasarkan sumbernya, hukum dibagi menjadi beberapa jenis. Sumber hukum formal yang paling utama dan menjadi dasar bagi pembentukan peraturan tertulis di Indonesia adalah...
- A. Yurisprudensi
 - B. Traktat
 - C. Doktrin
 - D. Kebiasaan
 - E. Undang-Undang